

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam suatu audit laporan keuangan terdapat berbagai macam pertimbangan bagi auditor untuk dapat memberikan opini terhadap laporan keuangan yang sedang mereka audit. Materialitas merupakan salah satu pertimbangan bagi auditor dalam merumuskan suatu opini. Materialitas adalah kesalahan penyajian termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat, diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Hal itu mengharuskan auditor dalam mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan agar terhindar dari salah saji material.

Salah saji adalah perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian atau pengungkapan dari suatu item laporan keuangan dengan yang seharusnya untuk item tersebut. Hal ini dapat terjadi salah satunya disebabkan oleh kesalahan pencatatan (*error*).

Penelitian ini mengangkat isu bahwa auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme dan etika profesi yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh pihak luar sangat diperlukan, khususnya untuk

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Biasanya satu tahun sekali akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham akan meminta pertanggung jawaban perusahaan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan mungkin tidak luput dari kesalahan pencatatan baik yang dilakukan secara tidak sengaja maupun rekayasa oleh karyawan itu sendiri. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya, sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi.

Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*Auditing*). Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangan perusahaan, selain itu laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi kepada pihak luar perusahaan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian ada dua kepentingan yang berbeda, disatu pihak, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, sedang dipihak lain yaitu pihak luar perusahaan, ingin memperoleh informasi yang akurat mengenai modal atau saham yang mereka tanamkan. Informasi tersebut terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan

valid jika dilakukan pemeriksaan oleh auditor independen.

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang independen dalam melakukan audit atas laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan.

Tingkat profesionalisme seorang akuntan publik juga ditentukan oleh tingkat perkembangan moralnya (*moral development*) sebagai syarat penting bagi seorang auditor eksternal. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada kode etik dan standar audit yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni: Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan, sebagai bahan utama pertimbangan dalam melakukan audit.

Pertimbangan audit banyak di pengaruhi oleh tekanan sosial dan lingkungan sehingga mendorong peneliti untuk memfokuskan pada bagaimana profesional audit merespon tekanan pengaruh sosial yang tidak tepat yang berasal dari dalam ataupun luar perusahaan. Secara khusus, literatur akuntansi memberikan bukti bahwa auditor rentan terhadap tekanan pengaruh sosial yang tidak tepat dari superior/atasan atau dari klien (Lord dan DeZoort, 1994) dan (Ponemon, 1992).

Boynton, Johnson & Kell (2001:286) mendefinisikan materialitas sebagai berikut:

“Besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang di luar keadaan di sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan

seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut.”

Meski aturannya cukup jelas, namun demikian auditor sering berhadapan dengan berbagai tekanan yang mungkin mempengaruhi kemampuannya dalam mengatasi situasi konflik. Sebagai contoh, pada saat auditor memahami tanggung jawab profesional, mereka mungkin memilih untuk bertindak secara tidak etis untuk memperoleh penilaian kinerja yang positif atau secara sederhana agar dipandang sebagai *team player*.

Berdasarkan *Statements on Auditing Standart* (SAS) menyatakan, dalam melaksanakan tugasnya auditor bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bagian SAS tersebut dengan tepat menekankan perlunya penerbitan pendapat atas laporan keuangan. Satu-satunya alasan mengapa auditor mengumpulkan berbagai bukti adalah untuk memungkinkan mereka mencapai kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material serta untuk menerbitkan laporan audit yang tepat berdasarkan bukti-bukti audit yang cukup memadai. Seorang auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak mungkin akan menyesatkan pengguna laporan keuangan yang cermat, maka auditor akan menerbitkan pendapat audit atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian) diharapkan oleh pemakai laporan keuangan dapat diyakini bahwa laporan keuangan tersebut dapat terhindar dari salah saji yang

material. Artinya, walaupun di dalam laporan keuangan tersebut terdapat salah saji tetapi nilainya kecil (tidak terlalu berpengaruh) maka salah saji tersebut dianggap wajar, sehingga dapat disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh umum.

Auditor harus meningkatkan kinerjanya supaya dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Guna peningkatan kinerja, hendaknya auditor memiliki sikap profesional dan kepatuhan terhadap etika profesi dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Gambaran tentang Profesionalisme seorang auditor tercermin dalam pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan terjamin.

Pengabdian pada profesi yaitu tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan, kecakapan dan kepatuhan terhadap etika profesi yang dimiliki. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang di harapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, disusul dengan kepuasan materi. Dengan totalitas yang dimiliki auditor akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam menentukan tingkat materialitas.

Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kesadaran auditor tentang peran

profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin.

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi) (Hall, 1968). Kemandirian seorang auditor sangat diperlukan dalam menentukan tingkat materialitas. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat benar-benar berdasarkan pada kondisi dan keadaan yang dihadapi dalam proses pengauditan.

Hubungan dengan rekan seprofesi yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan (Hall, 1968). Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional. Dengan banyaknya tambahan masukan akan menambah akumulasi pengetahuan auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan (Sutton, 1993) dalam (Wiedhani, 2004).

Fenomena mengenai tekanan ketaatan yaitu adanya laporan audit investigasi lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kasus RS Sumber Waras, pelaksanaan audit BPK yang terkesan terburu-buru, karena banyak opini yang disampaikan, tapi buktinya kurang. Auditor BPK bekerja di bawah tekanan karena sebagian pimpinannya berasal dari partai politik.

Sehingga membuat keraguan apakah hasil pertimbangan audit yang BPK keluarkan itu telah sesuai dengan prosedur atau tidak (Firdaus Ilyas, 2016).

Fenomena tentang *Moral reasoning* kasus suap terhadap auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kota Bekasi tahun 2009 membuktikan adanya gejala pemerintah daerah kejar predikat WTP. Kasus suap terhadap auditor BPK RI tersebut dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kualitas auditor dan kualitas hasil audit. Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo (1981) yang dikutip oleh Alkam (2013), bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad juga menambahkan bahwa predikat WTP selama ini selalu menjadi alasan institusi pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk menghindari pemeriksaan dari aparat penegak hukum. Kualitas audit merupakan bagian penting dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, maka terdapat karakteristik kualitas audit agar hasil audit dapat diterima oleh auditee. Pertama dapat dipahami, karakteristik utama kualitas informasi yang ada dalam proses audit adalah kemudahannya dipahami oleh publik atau pemakai laporan hasil audit.

Semua hal yang berhubungan dengan dokumen audit sektor publik yang diumumkan kepada publik harus mudah diakses dan mudah dipahami. Kedua relevan, informasi hasil audit harus relevan demi memenuhi kebutuhan audit yang telah direncanakan. Informasi hasil audit memiliki kualitas yang relevan

apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan publik dalam menilai peristiwa masa lalu, masa kini, dan memperkirakan masa depan. Ketiga keandalan, agar bermanfaat, informasi audit harus andal (*reliable*). Informasi audit akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakainya. Agar dapat diandalkan, informasi khususnya keuangan, audit harus menggambarkan dengan jujur penilaiannya. Keempat, dapat dibandingkan pemakai harus bisa membandingkan hasil audit antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja organisasi. Pemakai juga harus dapat membandingkan dokumen-dokumen dalam audit untuk mengevaluasi posisi organisasi (Indra Bastian, 2010). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi Negara memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil laporan audit BPK tersebut menjadi pertanyaan peneliti apakah rendahnya hasil pemberian opini oleh BPK tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM pelaksana APBD dan LKPD tersebut ataukah ada faktor-faktor lain seperti *moral reasoning* auditor dan skeptisisme auditor yang rendah atau rendahnya kendali mutu auditor BPK yang menjadi penyebab tinggi atau rendahnya kualitas audit yang dilakukan auditor BPK.

Fenomena tentang pelanggaran etika profesi yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpa Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada



regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*), (Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington). Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai kode etik. Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai, hal itu disampaikan pernyataan tertulis PCAOB. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011.

Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2010, Kredit Macet Hingga Rp. 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat. Seorang akuntan publik yang

menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkap kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk pengembangan bisnis dibidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, yang merupakan kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI Cabang Jambi yang terlibat kasus tersebut, menyatakan, setelah klien-nya diperiksa dan dicocokkan keterangannya dengan para saksi-saksi, terungkap ada dugaan keterlibatan dari Biasa Sitepu yang adalah sebagai akuntan publik pada kasus ini. Hasil pemeriksaan yang kemudian dikonfrontir keterangan tersangka dengan para saksi Biasa Sitepu, terungkap ada terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman modal ke BRI Cabang Jambi. Kasus kredit macet itu terungkap, setelah pihak kejaksaan menerima laporan tentang adanya penyalah-gunaan kredit yang diajukan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor.

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Penelitian**

No	Kasus
1	Kasus RS Sumber Waras tahun 2016.
2	Kasus suap terhadap auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kota Bekasi tahun 2009
3	Kasus Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja tahun 2017.
4	Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2010

Sumber: Data diolah, 2018

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada awal September 2009 pernah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada 8 Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Departemen keuangan dalam pengumuman yang diterima di Jakarta, sabtu, menyebutkan, penetapan sanksi pembekuan izin usaha itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Salah satu dari Akuntan Publik (AP) yang terkena sanksi adalah Drs. Hans Burhanuddin Makarao. Dengan dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Satandar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen (Hendra Gunawan,2012).

Berkembangnya profesi akuntan publik telah banyak diakui oleh kalangan kebutuhan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat luas terhadap jasa akuntan inilah yang menjadi pemicu perkembangan tersebut. Namun demikian, masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap profesi akuntan publik. Krisis atas menurunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap jasa mutu yang diberikan oleh akuntan publik di Indonesia semakin terlihat jelas seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia serta fenomena kebangkrutan perusahaan, seperti kasus mega skandal Enron dan Worldcom di USA. Enron, perusahaan raksasa dibidang energi dengan omset US \$ 100 milyar pada tahun 2000, secara mendadak mengalami kebangkrutan

dan meninggalkan hutang hampir US \$ 31.2 milyar. Kasus tersebut melibatkan salah satu *The Big Four*, yaitu Arthur Andersen *Certified Publik Accountant* (CPA) firm, yang mengaudit laporan keuangan Enron.

Bagaimana mereka sampai tidak mengetahui adanya material misstatement dalam laporan keuangan Enron selama bertahun-tahun. Apakah Arthur Anderson ikut terlibat merekayasa laporan keuangan Enron, karena Enron membayar Fee sebesar US \$ 52 Juta pada Arthur Enderson pada tahun 2000, tidak hanya jasa audit tetapi jasa konsultasi. Sebetulnya fungsi Auditor KAP bukan hanya menentukan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku umum, tetapi juga memberikan gambaran objektif dan akurat kepada investor maupun kreditor mengenai apa yang terjadi diperusahaan. Dalam kedua hal ini Athur Anderson dianggap gagal.

Selain menyangkut masalah profesional tersebut, para pengguna jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat diharapkan agar para auditor dapat memberika opini yang tepat, namun dalam praktiknya masih kerap sekali terjadi pemberian opini akuntan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam SPAP. Sehingga patut diduga ketidaksesuaian ini antara lain oleh belum optimalnya tingkat keprofesionalan dan dilema etika auditor dalam mengumpulkan bukti audit dan banyaknya materialitas yang terdapat dalam laporan keuangan klien tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada ketidaktepatan pemberian opini akuntan (Ida Suraida, 2005).

Motivasi peneliti dalam Penelitian ini yang pertama adanya isu kesenjangan ekspektasi yang dihadapi oleh auditor di dalam melakukan

pekerjaannya seperti perbedaan antara keinginan klien yang ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan keinginan auditor yang harus bertindak sesuai dengan bukti audit yang telah didupatkannya, kedua adanya isu bahwa auditor eksternal khususnya Auditor junior cenderung terus menerus mendapatkan tekanan dari atasan/ superior dan klien untuk bertindak tidak etis, ketiga banyaknya isu-isu yang menentukan terhadap ketimpangan yg dialami oleh auditor, keempat adanya isu kesenjangan antara perilaku auditor dengan praktek etika akuntan publik yang masih sering timbul pada saat auditor menjalankan tugas profesinya dan yang kelima adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh tekanan pengaruh sosial dan etika profesi terhadap tingkat materialitas serta menuangkannya dalam skripsi yang berjudul:

***“INVESTIGASI PENGARUH TEKATAN, MORAL REASONING DAN ETIKA PROFESI AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI DKI JAKARTA) ”***

## **1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Auditor tidak mematuhi Standar Auditing-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum sehingga membuat audit report terdeteksi mempunyai materialitas.

- 2) Adanya ketidaktepatan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang mempengaruhi tingkat materialitas.
- 3) Adanya salah saji yang bersifat material diabaikan oleh auditor.
- 4) Perilaku tidak etis dari auditor.
- 5) Isu terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap jasa akuntan publik.
- 6) Adanya isu tekanan ketaatan yang diterima auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya.
- 7) Adanya isu bahwa *moral reasoning* auditor menjadi penyebab tinggi atau rendahnya pertimbangan materialitas.
- 8) Banyaknya isu pelanggaran terhadap kode etika profesi yang sering dilakukan oleh auditor eksternal.

### 1.2.2. Pembatasan Masalah

Tingkat Materialitas suatu laporan keuangan akan mempengaruhi pendapat yang diberikan auditor. Tingkat materialitas ini didukung oleh Profesionalisme Auditor dan kepatuhan auditor.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi pada :

- 1) Variabel dependen yaitu Tingkat Materialitas dan variabel independen yaitu Tekanan Ketaatan, *Moral Reasoning* dan Etika Profesi auditor.
- 2) Penelitian ini hanya dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah DKI Jakarta .
- 3) Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan uji data analisis regresi linier berganda.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat Pengaruh Tekanan Ketaatan, *Moral Reasoning*, dan Etika Profesi Auditor terhadap Tingkat Materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah DKI Jakarta secara simultan ?
- 2) Apakah terdapat Tekanan Ketaatan auditor terhadap tingkat materialitas secara parsial ?
- 3) Apakah terdapat pengaruh *Moral Reasoning* auditor terhadap tingkat materialitas parsial ?
- 4) Apakah terdapat pengaruh Etika Profesi auditor terhadap tingkat materialitas parsial ?

### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji Tekanan Ketaatan, *Moral Reasoning*, dan Etika Profesi Auditor terhadap Tingkat Materialitas dalam pengauditan laporan keuangan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Jakarta secara simultan.
- 2) Untuk mengkaji Tekanan Ketaatan terhadap tingkat materialitas secara parsial.
- 3) Untuk mengkaji pengaruh *Moral Reasoning* auditor terhadap tingkat materialitas parsial.

- 4) Untuk mengkaji pengaruh Etika Profesi auditor terhadap tingkat materialitas parsial.

#### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh pada waktu kuliah dan dapat semoga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pengalaman seputar *auditing* mengenai pengaruh tekanan ketaatan, *moral reasoning*, dan etika profesi auditor terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik (KAP) serta meningkatkan kemampuan penulis untuk berfikir secara ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk yang sistematis.

- 2) Manfaat Praktik

Dari hasil penelitian yang berupa data yang telah diolah dan dianalisis diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pertimbangan bagi auditor independen pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam membuat keputusan auditnya agar selalu berpedoman pada Kode Etik Akuntan dan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga semua pihak yang mengandalkan jasa auditor independen dapat menerima manfaatnya serta meningkatkan kepercayaan terhadap auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai jasanya.